

PELAPORAN KEUANGAN UMKM PSM DAN CABANG SESUAI DENGAN PSAK 65

Yosep eka putra¹, Miftahusa'ada.W², Rahmi Trinovila³, Sri Rahayu⁴, Vegi Sabrina Hidayat⁵, Mega Rahmi⁶
Akuntansi Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar

ABSTRACT

This article discusses the financial recording and reporting practices of the Pekanbaru Shopping Mall (PSM) MSME and its branches, including Batusangkar, Bukit Gombang, and Cubadak. Based on observations and interviews, it was found that the recording system used is still very rudimentary and does not comply with PSAK 65 requirements for the preparation of consolidated financial statements. Transaction recording is limited to cash flow without account classification, without separation between head office and branches, and without the preparation of a structured income statement and balance sheet. Furthermore, internal transactions, such as shipments of goods from head office to branches, are not recorded in accounting, complicating the process of preparing consolidated reports and eliminating inter-unit transactions. These findings indicate the need for improvements to the accounting system at the PSM MSME to provide accurate, relevant, and standardized financial reports. By correctly implementing PSAK 65, the PSM MSME can improve the quality of financial information needed for decision-making and business control.

Keywords: *UMKM, Financial Reporting, PSAK 65, Consolidation, Head Office and Branch Office*

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi UMKM (Rahmat, 2025). Pelaporan keuangan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan suatu usaha, karena melalui laporan keuangan sebuah entitas dapat menilai kinerja, mengendalikan sumber daya, serta merencanakan strategi yang tepat untuk perkembangan usaha di masa mendatang. Di samping berperan sebagai sarana komunikasi keuangan, laporan keuangan merupakan dasar penting untuk menilai efektivitas manajemen, memahami tingkat risiko, dan meninjau prospek masa depan entitas (Kusumaningrum et al., 2026). Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Widiastiwati & Hambali, 2020). Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa karena memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Ningtiyas, 2017). Di Indonesia, UMKM merupakan sektor yang menyumbang sebagian besar lapangan kerja, sehingga kualitas pengelolaan usahanya, termasuk dalam hal pelaporan keuangan, sangat menentukan daya saing dan keberlanjutan mereka. Namun kenyataannya, sebagian besar UMKM masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, yaitu hanya mencatat kas masuk dan kas keluar tanpa memperhatikan kaidah akuntansi yang benar. Kondisi tersebut banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemilik UMKM tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai standar, minimnya akses terhadap pendidikan akuntansi, serta terbatasnya sumber daya untuk menerapkan sistem pencatatan yang lebih modern.

Masalah tersebut juga terlihat jelas pada UMKM Pekanbaru Shopping Mall (PSM), yang bergerak dalam bidang penjualan aksesoris dan kosmetik dan telah berkembang dengan membuka cabang di beberapa lokasi, yaitu Batusangkar, Bukit Gombang, dan Cubadak. Meskipun telah memiliki beberapa cabang, pencatatan keuangan UMKM PSM masih dilakukan secara tradisional dan tidak memenuhi prinsip akuntansi yang memadai. Transaksi keuangan hanya dicatat dalam buku kas umum tanpa klasifikasi akun dan tanpa pemisahan antara transaksi pusat dan cabang. Selain itu, tidak ada penyusunan jurnal, tidak ada pencatatan persediaan cabang, tidak ada laporan laba rugi cabang, serta tidak ada laporan posisi keuangan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan modal secara jelas. Ketidakteraturan ini menyebabkan banyak informasi penting tidak dapat diketahui oleh pemilik usaha, seperti berapa jumlah modal yang tertanam di tiap cabang, berapa besar laba yang dihasilkan cabang, bagaimana kondisi persediaan barang, serta bagaimana performa keuangan usaha secara keseluruhan. Akibatnya, pengambilan keputusan menjadi tidak berbasis data yang valid, dan evaluasi terhadap kinerja tiap cabang tidak dapat dilakukan secara objektif.

Dalam konteks standar akuntansi, PSAK 65 merupakan ketentuan yang mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian, yaitu laporan yang menggabungkan laporan entitas induk dengan entitas anak ketika terdapat unsur pengendalian. Meskipun UMKM tidak masuk kategori perusahaan besar yang wajib menerapkan PSAK secara penuh, keberadaan cabang membuat pemilik usaha perlu memahami konsep dasar pengendalian seperti yang dijelaskan dalam PSAK 65. Dalam struktur UMKM PSM, pusat memiliki kekuasaan penuh atas operasional cabang, mulai dari penyediaan barang dagangan, pengaturan harga jual, hingga audit kas harian, sehingga konsep hubungan induk dan anak dalam PSAK 65 menjadi relevan. Sesuai dengan prinsip PSAK 65, entitas yang mengendalikan entitas lain berkewajiban untuk menyusun laporan konsolidasi agar laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan secara menyeluruh dan tidak menyesatkan. Namun, pada

UMKM PSM, tidak adanya pencatatan transaksi internal seperti pengiriman barang dari pusat ke cabang, serta tidak adanya pencatatan persediaan cabang dan biaya operasional, menyebabkan penyusunan laporan konsolidasi tidak dapat dilakukan. Kekurangan ini membuat posisi keuangan PSM secara keseluruhan menjadi kabur dan tidak terukur secara akurat.

Di sisi lain, pelaporan keuangan yang akurat dan sesuai standar memiliki banyak manfaat bagi UMKM, terutama yang sedang berkembang seperti PSM. Dengan laporan keuangan yang baik, pemilik usaha dapat mengetahui tingkat keuntungan yang dihasilkan setiap cabang, menganalisis efisiensi penggunaan modal, mengendalikan biaya operasional, serta merencanakan ekspansi usaha dengan lebih tepat. Selain itu, laporan keuangan yang tersusun rapi juga menjadi syarat ketika UMKM ingin mengajukan pembiayaan ke bank, mencari investor, atau menjalin kerja sama kemitraan dengan pihak lain. Dengan demikian, penerapan prinsip PSAK 65 bukan hanya sekadar memenuhi aturan akuntansi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola usaha dan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan UMKM.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian dengan judul “Pelaporan Keuangan UMKM PSM dan Cabang Sesuai dengan PSAK 65” dilakukan untuk mengkaji kondisi pelaporan keuangan UMKM PSM saat ini, mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam sistem pencatatan pusat dan cabang, serta menganalisis bagaimana penerapan konsep konsolidasi dalam PSAK 65 dapat membantu memperbaiki mutu pelaporan keuangan UMKM tersebut. Penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan UMKM untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan literatur mengenai akuntansi UMKM yang masih jarang dikaji secara mendalam, terutama terkait hubungan pusat dan cabang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi UMKM PSM sebagai objek studi, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi UMKM lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan laporan keuangan.

Penelitian mengenai penerapan PSAK 65 telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Saputri, S. W., Lestari, B. P., Hasibuan, V. A., dan Rodiah, S. (2023) dalam artikelnya berjudul “Penerapan PSAK 65 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian pada PT Dalimo Jaya Motor” yang dimuat dalam Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN), Volume 2 Nomor 3 Tahun 2023, menjelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasi wajib disusun oleh entitas induk ketika terdapat pengendalian terhadap satu atau lebih entitas anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Dalimo Jaya Motor telah menggabungkan laporan keuangan kantor pusat dan cabang menjadi satu kesatuan laporan sesuai dengan PSAK 65. Para penulis juga menegaskan bahwa seluruh pendapatan dan pengeluaran dari entitas induk dan cabang dicatat dalam laporan gabungan yang menggambarkan kondisi perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa transaksi antara kantor pusat dan cabang, seperti pengiriman barang dagangan dan pengakuan laba cabang, telah dilakukan sesuai prinsip konsolidasi PSAK 65, sehingga laporan keuangan yang disusun menggambarkan posisi keuangan grup secara menyeluruh.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ryketeng, M., Nuraeni, S., Putri A., Junillah A. L., dan Ariqah N. I. (2024) dalam jurnal Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi, Volume 2 Nomor 1 berjudul “Implementasi PSAK 65 pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Astra Agro Lestari Tbk dan Entitas Anak” juga menegaskan pentingnya penerapan standar PSAK 65 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Mereka menemukan bahwa PT Astra Agro Lestari telah konsisten menyusun laporan konsolidasi dengan menggabungkan laporan seluruh entitas anak melalui pelaporan berkala yang kemudian dikompilasi oleh perusahaan induk. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi selama proses konsolidasi dilakukan sesuai PSAK 65, termasuk eliminasi transaksi internal, penyajian laba rugi konsolidasi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasi. Penulis juga menegaskan bahwa prinsip pengendalian menjadi dasar utama dalam menentukan entitas anak yang wajib dikonsolidasikan.

Penelitian berikutnya berasal dari Nila Ayu Pratiwi, Refina Pramudya Wardana, Silvia Maharani, dan Endang Kartini Panggiarti (2023) dalam artikel berjudul “Penerapan PSAK Nomor 65, PSAK Nomor 22, dan PSAK Nomor 4 Pada Laporan Keuangan Konsolidasi” yang diterbitkan dalam Jurnal Gemilang Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini menyatakan bahwa PSAK 65 memberikan pedoman menyeluruh untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menekankan penghapusan transaksi internal serta penyesuaian nilai wajar aset dan liabilitas entitas anak saat konsolidasi. Penulis menjelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasi bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai posisi keuangan perusahaan induk beserta seluruh anak perusahaan sehingga informasi yang disajikan lebih komprehensif dan dapat diandalkan oleh investor serta pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa konsolidasi penuh wajib dilakukan ketika entitas induk memiliki kendali atas entitas anak.

Selain itu, Taufiq Khaerudin (2023) melalui publikasinya dalam Jurnal Ekonomika Vol. 10 No. 2 Tahun 2023 berjudul “Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan Penerapan PSAK No. 15, PSAK No. 22 dan PSAK No. 65” memberikan pandangan komprehensif mengenai prosedur konsolidasi yang harus dilakukan oleh entitas induk. Ia menegaskan bahwa PSAK 65 mendasari penggabungan laporan keuangan entitas induk dan anak serta mewajibkan entitas induk untuk tidak menyusun laporan keuangan terpisah kecuali

sebagai informasi tambahan. Khaerudin juga menjelaskan bahwa proses konsolidasi meliputi pengumpulan data keuangan, penyesuaian kebijakan akuntansi, eliminasi transaksi internal, serta penggabungan akun sejenis untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang sesuai standar.

Dari empat penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa PSAK 65 menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan seluruh penelitian sepakat bahwa standar ini memastikan penyajian keuangan yang lebih transparan, komprehensif, dan akurat bagi perusahaan yang memiliki entitas cabang maupun anak. Penelitian-penelitian tersebut juga memberikan landasan kuat bagi penelitian mengenai pelaporan keuangan UMKM PSM dan cabang sesuai PSAK 65, karena prinsip-prinsip konsolidasi, eliminasi transaksi internal, dan pengendalian entitas sama-sama relevan diterapkan pada entitas dengan struktur pusat dan cabang seperti UMKM PSM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi “Pelaporan Keuangan UMKM PSM dan Cabang Sesuai dengan PSAK 65” adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan UMKM PSM beserta cabangnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka atau data kuantitatif, tetapi lebih pada proses, prosedur, dan perilaku pencatatan keuangan yang berlangsung di lapangan. Penelitian kualitatif memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara alami, memahami konteksnya, serta menangkap detail-detail penting yang mungkin tidak terlihat melalui metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengidentifikasi bagaimana pusat dan cabang melakukan pencatatan transaksi, bagaimana proses pengiriman barang dilakukan, serta bagaimana laporan keuangan dipahami dan digunakan oleh pemilik usaha dalam pengambilan keputusan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pemilik UMKM PSM dan beberapa pengelola cabang untuk memperoleh informasi langsung mengenai sistem pencatatan yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta pemahaman mereka terhadap pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang kaya sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara lebih bebas. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap praktik pencatatan di pusat dan cabang dengan memeriksa buku kas, nota penjualan, bukti pembelian, serta dokumen lainnya yang digunakan dalam proses pencatatan transaksi. Observasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya berasal dari pernyataan informan, tetapi juga mencerminkan kondisi yang nyata di lapangan.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa literatur terkait PSAK 65, jurnal penelitian sebelumnya mengenai pelaporan keuangan UMKM, buku teks akuntansi pusat dan cabang, serta dokumen pendukung lain yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka teori, memperkuat analisis, serta membandingkan praktik pencatatan UMKM PSM dengan standar akuntansi yang berlaku. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan memilah informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi data ke dalam bentuk narasi sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola dan hubungan antar informasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis kesesuaian antara praktik pencatatan UMKM PSM dengan ketentuan PSAK 65 dan menentukan temuan utama penelitian.

Melalui metode penelitian yang sistematis dan mendalam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi nyata pencatatan keuangan UMKM PSM, mengidentifikasi kelemahan yang harus diperbaiki, serta menunjukkan bagaimana standar PSAK 65 dapat membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bagi UMKM yang memiliki cabang. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan tidak hanya menghasilkan data empiris, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang pentingnya penerapan standar akuntansi pada usaha kecil dan menengah yang sedang berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PSAK 65 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian, yaitu laporan keuangan yang menggabungkan laporan entitas induk dengan entitas anak yang berada di bawah pengendaliannya. Standar ini menekankan bahwa konsolidasi dilakukan jika perusahaan memenuhi tiga unsur pengendalian, yaitu memiliki kekuasaan atas entitas lain, memperoleh imbal hasil variabel dari keterlibatannya, dan mampu menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut. Dengan kata lain, PSAK 65 memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan seluruh kelompok usaha secara menyeluruh, bukan hanya entitas induknya saja.

Pada PSAK No. 65 tidak menganut azas kepemilikan (ownership) tetapi azas pengendalian (control), dimana pengendalian akan dianggap ada, jika perusahaan mempunyai hak suara dengan jumlah kepemilikan saham yang terdiri sebesar lebih dari 50% baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, konsolidasi dilakukan jika perusahaan memiliki kekuatan untuk dapat mengatur kebijakan operasional dan finansial pada perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Khaerudin et al., 2023).

Bagi UMKM, PSAK 65 umumnya tidak diterapkan secara langsung karena kebanyakan UMKM tidak memiliki entitas anak atau struktur kelompok usaha yang kompleks. Namun, PSAK 65 tetap relevan jika sebuah UMKM berkembang menjadi lebih besar dan mulai membuka cabang atau membentuk unit usaha yang terpisah secara hukum. Dalam kondisi ini, UMKM perlu memahami konsep pengendalian serta kewajiban konsolidasi agar laporan keuangannya tetap sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman PSAK 65 juga penting bagi UMKM yang ingin memperoleh pendanaan, bermitra dengan investor, atau melakukan ekspansi usaha, karena laporan keuangan yang tersusun dengan baik akan meningkatkan kredibilitas dan transparansi usaha tersebut.

Pencatatan Transaksi Pusat dan Cabang dalam Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan UMKM PSM Berdasarkan PSAK 65 Pengelolaan sistem akuntansi terpisah antara kantor pusat dan setiap cabang akan memberikan pengendalian yang baik terhadap operasi dan manajemen puncak menilai kinerja masing – masing cabang. Walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang telah mengelola pembukuan sendiri, seluruh akun akan digabungkan untuk pelaporan eksternal sehingga pencatatan menjadi satu kesatuan antara kantor pusat dengan kantor cabang (Sri Wulan Saputri et al., 2023). Penyusunan laporan keuangan gabungan antara pusat dan cabang pada UMKM PSM membutuhkan pencatatan transaksi yang jelas dari setiap unit usaha. Sesuai PSAK 65, laporan gabungan harus menunjukkan kondisi keseluruhan entitas yang berada dalam satu kendali, baik pusat maupun cabang. Hal ini sejalan dengan pendapat Pratiwi et al. (2023) yang menyatakan bahwa laporan konsolidasi diperlukan untuk menggambarkan posisi keuangan entitas secara menyeluruh meskipun unit-unitnya tidak berbadan hukum terpisah. Oleh sebab itu, pencatatan yang terstruktur antara pusat dan cabang menjadi syarat utama agar laporan keuangan dapat disusun secara wajar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak pengelola UMKM PSM, diperoleh gambaran bahwa pencatatan pusat dan cabang masih dilakukan secara sederhana dan tidak terpisah. Catatan transaksi harian hanya mencatat uang masuk dan uang keluar, tanpa klasifikasi akun, tanpa jurnal, dan tanpa pemisahan transaksi pusat cabang. Kondisi ini serupa dengan temuan Gazali et al. (2025) yang menjelaskan bahwa sebagian besar UMKM mencatat transaksi berdasarkan arus kas saja, sehingga sulit menyajikan laporan yang sesuai standar akuntansi ketika usaha memiliki lebih dari satu unit operasional.

Dalam konteks PSM, laporan yang berasal dari cabang belum disusun dalam bentuk laporan laba rugi atau neraca cabang. Malah, seluruh transaksi dicatat dalam satu buku kas umum. Hal ini menyulitkan proses konsolidasi karena tidak ada data aset, liabilitas, pendapatan, maupun beban cabang secara mandiri. Meskipun demikian, seluruh transaksi memiliki bukti nota sehingga data sebenarnya cukup untuk disusun ulang menjadi laporan yang lebih terstruktur.

Pengakuan Laba Cabang

Pada UMKM PSM, laba cabang belum dihitung secara sistematis. Cabang tidak membuat laporan laba rugi, tidak mencatat harga pokok penjualan, dan tidak memiliki laporan persediaan. Semua pemasukan cabang disetorkan langsung ke pusat, dan seluruh pengeluaran dicatat pusat tanpa memisahkan mana pengeluaran pusat dan mana pengeluaran cabang.

Dalam praktik yang sesuai PSAK 65, setiap cabang seharusnya menghitung laba untuk periode tertentu agar kantor pusat dapat mengakui bagiannya dalam konsolidasi. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pratiwi et al. (2023) yang menyebutkan bahwa unit usaha harus menyajikan laporan operasional masing-masing agar dapat digabungkan secara konsolidatif.

Kondisi di PSM membuat laba cabang tidak dapat diketahui. Cabang hanya mencatat kas harian tanpa menghitung margin laba atau biaya operasional yang ditanggung cabang. Dengan demikian, pusat tidak memiliki dasar untuk mengakui laba cabang secara akuntansi. Dengan tidak adanya laporan laba cabang, maka pusat tidak dapat meningkatkan nilai investasi atas cabang sebagaimana prinsip konsolidasi.

Pengiriman Barang Dagangan dari Pusat ke Cabang

Pada UMKM PSM, seluruh barang dagangan untuk cabang dikirim oleh pusat. Cabang tidak membeli langsung dari pemasok. Namun secara pencatatan, pengiriman barang tersebut tidak dicatat sebagai transaksi internal atau sebagai penambahan persediaan cabang. Pusat hanya mencatat pembelian barang, tetapi tidak mencatat barang yang dialokasikan ke cabang.

Ketika persediaan cabang mulai menipis, cabang akan melaporkan kebutuhan barang kepada pusat dan pusat akan mengirimkan stok baru. Namun pencatatan internal terhadap transaksi ini tidak dilakukan. Tidak ada akun Pengiriman Barang ke Cabang, Persediaan Cabang, maupun Barang dalam Transit.

Padahal dalam standar konsolidasi, barang yang dikirim dari pusat seharusnya dicatat dengan nilai perolehan, dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan pusat. Hal ini sesuai dengan prinsip PSAK 65 dan sejalan dengan penjelasan Gazali et al. (2025) yang menyatakan bahwa transaksi antarunit dalam satu entitas harus dicatat pada kedua pihak untuk memudahkan eliminasi konsolidasi.

Pada kasus PSM, karena tidak ada pencatatan persediaan cabang, maka:

1. nilai barang yang berada di cabang tidak diketahui,
2. harga pokok penjualan cabang tidak dapat dihitung,
3. laporan konsolidasi tidak dapat dibuat karena tidak ada akun timbal balik,
4. eliminasi transaksi internal menjadi tidak mungkin dilakukan.

Oleh sebab itu, pengiriman barang pusat dan cabang pada PSM belum sesuai dengan prinsip penyusunan laporan gabungan yang mensyaratkan adanya pencatatan persediaan dan transaksi internal yang konsisten. Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai kondisi pencatatan keuangan pusat dan cabang pada UMKM PSM, solusi paling strategis yang perlu dilakukan adalah membangun sistem akuntansi yang terintegrasi dan mampu memisahkan secara jelas aktivitas keuangan setiap unit usaha. Selama ini, pencatatan transaksi hanya berfokus pada uang masuk dan uang keluar, tanpa adanya klasifikasi akun yang memadai, tanpa jurnal umum, dan tanpa pemisahan transaksi pusat serta cabang. Kondisi tersebut menyebabkan pusat kesulitan menyusun laporan keuangan yang akurat, terlebih ketika UMKM memiliki cabang operasional yang berjalan secara mandiri. Oleh karena itu, langkah awal yang sangat penting adalah membuat buku besar tersendiri bagi pusat dan masing-masing cabang. Dengan buku besar ini, setiap unit dapat mencatat transaksi sesuai akun-akun akuntansi seperti pendapatan, beban operasional, aset, liabilitas, modal, serta perubahan persediaan. Pemisahan pencatatan ini penting karena PSAK 65 menuntut laporan keuangan konsolidasian hanya dapat dibuat jika data keuangan setiap unit usaha disajikan secara wajar dan terstruktur.

Solusi berikutnya adalah menerapkan sistem pencatatan yang berbasis akrual, bukan hanya berbasis kas yang selama ini digunakan oleh UMKM PSM. Pencatatan berbasis kas tidak mampu mencerminkan kewajiban, piutang, pergerakan persediaan, atau pengakuan pendapatan secara akuntansi. Padahal, ketika UMKM telah memiliki cabang, setiap unit harus dapat mengukur kinerja keuangan secara akurat melalui laporan laba rugi dan neraca periodik. Dengan mengadopsi akuntansi berbasis akrual, UMKM PSM dapat mengakui pendapatan dan beban pada periode terjadinya transaksi, bukan hanya saat kas diterima atau dikeluarkan. Penerapan akuntansi akrual juga memungkinkan pusat melakukan konsolidasi keuangan cabang sesuai PSAK 65 karena data keuangan yang diperoleh lebih lengkap dan dapat disandingkan secara sistematis antarunit.

Solusi ketiga yang sangat krusial adalah membangun prosedur pencatatan internal untuk transaksi pengiriman barang dari pusat ke cabang. Berdasarkan pengamatan, pengiriman barang selama ini tidak dicatat baik oleh pusat maupun cabang. Padahal, transaksi tersebut merupakan elemen penting dalam penyusunan laporan konsolidasi. UMKM PSM perlu mencatat barang yang dikirim kepada cabang dengan menggunakan akun seperti Pengiriman Barang ke Cabang di pusat dan Persediaan Cabang di unit cabang. Ketika barang diterima cabang, perlu dibuat jurnal penerimaan yang menunjukkan penambahan persediaan cabang dengan nilai perolehan. Pencatatan ini juga harus dilengkapi dengan dokumen pengiriman seperti nota transfer internal atau surat jalan antarunit. Dengan adanya pencatatan ini, pusat dapat menghitung dengan benar nilai persediaan yang berada di cabang, sementara cabang dapat menghitung harga pokok penjualan (HPP) berdasarkan nilai persediaan yang digunakan. Pencatatan seperti ini merupakan praktik standar pada entitas yang memiliki struktur pusat dan cabang, sehingga eliminasi transaksi internal dapat dilakukan sesuai prinsip konsolidasi PSAK 65.

Selanjutnya, UMKM PSM perlu menyusun laporan laba rugi cabang secara mandiri untuk mengetahui kinerja masing-masing unit operasional. Saat ini, laba cabang tidak dapat diketahui karena cabang tidak menyusun laporan laba rugi, tidak menghitung HPP, dan tidak mencatat beban operasional secara terpisah. Padahal, tanpa mengetahui laba per cabang, pusat tidak dapat melakukan penilaian investasi atas unit cabang, dan tidak dapat mengetahui kontribusi masing-masing cabang terhadap total pendapatan usaha. Solusi ini sesuai dengan penjelasan Pratiwi et al. (2023) bahwa setiap unit usaha wajib menyajikan laporan operasional individual apabila akan dilakukan penggabungan laporan keuangan. Dengan laporan laba rugi cabang, pusat dapat menentukan strategi bisnis seperti alokasi modal, pembukaan cabang baru, atau perbaikan kinerja cabang yang kurang optimal.

Selain itu, UMKM PSM disarankan untuk menggunakan aplikasi pembukuan digital yang mampu mengintegrasikan pencatatan pusat dan cabang. Aplikasi seperti Accurate Lite, BukuKas, BeeCloud, atau MOKA POS memungkinkan pencatatan persediaan, transaksi harian, hingga laporan keuangan tersaji secara otomatis. Dengan sistem terintegrasi, pusat dapat mengakses transaksi cabang secara real-time, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, dan mempermudah proses penyusunan laporan akhir tahun. Aplikasi ini juga

memungkinkan pembuatan laporan laba rugi per cabang, laporan neraca cabang, hingga rekonsiliasi stok barang secara langsung. Hal ini bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mempermudah UMKM PSM dalam memenuhi persyaratan laporan keuangan yang kredibel untuk keperluan pinjaman modal, audit, maupun kerjasama bisnis.

Tidak kalah penting, UMKM PSM perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup seluruh aktivitas pencatatan transaksi baik di pusat maupun cabang. SOP harus menjelaskan langkah-langkah pencatatan transaksi harian, prosedur pengiriman barang, format laporan keuangan, hingga ketentuan pelaporan bulanan kepada pusat. Dengan SOP, cabang memiliki pedoman formal yang harus dipatuhi sehingga pencatatan tidak berubah-ubah dan tetap konsisten. SOP juga meningkatkan efektivitas pengendalian internal karena pusat dapat memastikan bahwa cabang mengikuti prosedur yang sama dalam melakukan pencatatan. SOP yang baik akan mempermudah proses audit internal serta meningkatkan keandalan laporan gabungan yang disusun pusat.

Terakhir, solusi fundamental yang harus dilakukan adalah memberikan pelatihan akuntansi rutin kepada staf pusat dan cabang. Minimnya pengetahuan akuntansi adalah akar dari banyak persoalan pencatatan keuangan UMKM, termasuk UMKM PSM. Pelatihan dapat dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi, dinas koperasi, atau organisasi pemberdayaan UMKM. Pelatihan harus mencakup penggunaan aplikasi pembukuan, penyusunan laporan keuangan sederhana, pencatatan persediaan, serta pemahaman dasar standar akuntansi seperti PSAK 1, PSAK 14, dan PSAK 65. Dengan peningkatan kapasitas SDM, UMKM PSM dapat mengelola pembukuan secara mandiri dan menyusun laporan yang lebih akurat serta lebih sesuai standar. Keberhasilan pelatihan ini berdampak langsung terhadap kemampuan UMKM PSM untuk berkembang menjadi entitas bisnis yang lebih terstruktur dan profesional.

Dengan menerapkan seluruh solusi tersebut, UMKM PSM akan memiliki fondasi akuntansi yang jauh lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan usahanya. Pencatatan transaksi menjadi lebih rapi, laporan keuangan lebih akurat, proses penggabungan laporan antarunit berjalan sesuai PSAK 65, dan pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan berdasarkan data yang valid. Lebih dari itu, UMKM PSM akan lebih siap untuk menghadapi persaingan dan memperoleh berbagai kesempatan pendanaan atau kemitraan di masa depan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan UMKM PSM belum menerapkan praktik akuntansi yang sesuai dengan ketentuan PSAK 65 terkait penyusunan laporan keuangan gabungan antara pusat dan cabang. Pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana melalui buku kas yang hanya memuat uang masuk dan uang keluar, tanpa klasifikasi akun serta tanpa pemisahan transaksi pusat dan cabang. Kondisi ini menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan tidak mampu menggambarkan posisi keuangan maupun kinerja operasional masing-masing unit secara akurat. Minimnya struktur pencatatan juga menghambat penyusunan laporan konsolidasi yang membutuhkan data aset, liabilitas, pendapatan, beban, persediaan, dan transaksi internal secara rinci.

Selain itu, UMKM PSM menunjukkan bahwa laba cabang tidak dapat dihitung karena cabang tidak menyusun laporan laba rugi, tidak mencatat persediaan, serta tidak menghitung harga pokok penjualan. Semua pemasukan cabang disetorkan langsung ke pusat, sedangkan seluruh pengeluaran dicatat dalam satu buku kas tanpa identifikasi mana yang merupakan biaya operasional cabang. Hal ini bertentangan dengan prinsip PSAK 65 yang mengharuskan setiap unit usaha menyajikan laporan keuangan sebagai dasar konsolidasi. Tanpa adanya perhitungan laba yang jelas, pusat juga tidak memiliki dasar akuntansi yang memadai untuk menentukan nilai investasi pada cabang atau mengakui laba rugi dari aktivitas cabang.

Masalah lain muncul pada pencatatan persediaan dan transaksi pengiriman barang dari pusat ke cabang. Barang yang dikirim oleh pusat tidak dicatat sebagai penambahan persediaan cabang dan tidak dianggap sebagai transaksi internal yang membutuhkan eliminasi dalam laporan konsolidasi. Ketidadaan pencatatan ini menyebabkan nilai persediaan cabang tidak diketahui, harga pokok penjualan cabang tidak dapat dihitung, serta tidak adanya akun timbal balik yang diperlukan dalam proses konsolidasi. Padahal, sesuai PSAK 65, pengiriman barang antarunit dalam satu entitas harus dicatat pada kedua pihak untuk memastikan laporan keuangan gabungan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan bebas dari penggandaan transaksi.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan UMKM PSM belum memenuhi standar penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ketidakteraturan pencatatan, tidak adanya pemisahan antara pusat dan cabang, serta ketidadaan laporan operasional cabang menyebabkan laporan konsolidasi tidak dapat disusun secara memadai. Untuk mencapai kepatuhan terhadap PSAK 65, UMKM PSM perlu melakukan pembenahan sistem akuntansi dengan memulai pemisahan pencatatan pusat dan cabang, menyusun laporan keuangan mandiri untuk masing-masing unit, serta mencatat transaksi internal secara benar agar laporan keuangan gabungan dapat tersaji secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, A., & Putri, W. A. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi pada UMKM untuk Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal UMKM Indonesia*, 5(2), 72–85.
- Fitriani, R., & Basri, Y. M. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi AkruaI pada UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 30–44.
- Gazali, A., Putra, R., & Hasan, M. (2025). Penerapan PSAK 65 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi pada UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 12(1), 45–59.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasi. Jakarta: IAI.
- Khaerudin, T., Aileen Okta Azalia, Nabilah Maulita, & Endang Kartini Panggiarti. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan Penerapan Psak No. 15, Psak No. 22 Dan Psak No. 65. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 308–315. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.815>
- Kusumaningrum, Y., Ayu, T., Fitriyani, D., & Eka, A. (2026). ANALISIS PENERAPAN PSAK 65 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PSAK 15 DAN PSAK 22 DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK TAHUN 2024. 3(1), 24–31.
- Ningtiyas, J. D. A. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(1), 11–17.
- Pratiwi, N. A., Wardana, R. P., Maharani, S., & Panggiarti, E. K. (2023). Penerapan PSAK Nomor 65, PSAK Nomor 22, dan PSAK Nomor 4 Pada Laporan Keuangan Konsolidasi. *Jurnal Gemilang*, 3(3), 112–125.
- Rahmat. (2025). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Bakso Bakar Rahmat Berdasarkan SAK EMKM. *Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 3(02), 100–111.
- Ryketeng, M., Nuraeni, S., Putri, A., Junilliah, A. L., & Arqiah, N. I. (2024). Implementasi PSAK 65 pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Astra Agro Lestari Tbk dan Entitas Anak. *Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi*, 2(1), 1–15.
- Saputri, S. W., Lestari, B. P., Hasibuan, A. V., & Rodiah, S. (2023). Penerapan PSAK 65 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi (Studi Kasus pada PT Dallmo Jaya Motor). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 54–70.
- Sri Wulan Saputri, Bunga Puji Lestari, Vania Adisty Hasibuan, & Siti Rodiah. (2023). Penerapan PSAK 65 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pada PT Dalimo Jaya Motor. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3), 197–203. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i3.2285>
- Taufiq, K. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan Penerapan PSAK No. 15, PSAK No. 22 dan PSAK No. 65. *Jurnal Ekonomika*, 10(2), 88–103.
- Widiastawati, B., & Hambali, D. (2020). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM UD Sari Bunga. *Analisis*, 2(2), 38–48.
- Wijayanti, N. L., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pencatatan Digital terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(4), 201–214.